



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI UTARA DAN SULAWESI
TENGAH**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

RABU, 10 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Demokrat (Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 16.06 -18.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Amriansyah Maulana
Abdul Ghoffar
Indah Karmadaniah
Rimas Kautsar
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. I Wayan Sudirta
2. Mulyadi Marks Phillian
3. Jemmy Mokolensang

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Totok Prasetyanto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Surya Imam Wahyudi
2. R.A. Shanti Dewi Muliaharjani
3. Jubir
4. Andi Muhammad Yusuf

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Denny Kaunang
2. Taufik Basari
3. Rahmat Taufit
4. Revin E. D. Rompas

E. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yandri Sudarso
2. Ishak R. Sugeha
3. Gerald P. Runtuthomas

F. Kuasa Pemohon Pihak Terkait Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rommy Poli

G. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ade Yan Yan H.S.
2. Dendy Zuhairil Finsa
3. Friska JM Gultom

H. Pemohon Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Syarif Hidayatullah

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahmar Ihsan

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Slamet Santoso

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Meizaldi Mufti
2. Yasin

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Taufik Basari
2. Rahmat Taufik
3. Azriadi Malewa
4. Erfandi

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ridwan Darmawan
2. Pak Jellij Dondokambey

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Aristya K. Dewi
2. Rozaq Ashary

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Saleh Hidayat

P. Termohon:

1. Remana Nugroho
2. Viryan
3. Naharuddin
4. Febi Hari Oktavianto
5. Muhammad Ridwan Saleh
6. Great Santismara
7. Ade Sonata
8. Syafari Riyadi
9. Yessy Momongan
10. Asep Andryanto
11. Hasyim Asy'ari
12. Pramono Ubaid Tanthowi
13. Ahmad Jazuli
14. Meisca Rafinda
15. Ely Sunarya
16. Yuni Iswanto
17. Setya Indra Arifin

Q. Bawaslu

1. Ratna Dewi Pettalolo
2. Bella N
3. Supriyadi Pangelu
4. Awaluddin Numbollu
5. Ruslan Husen
6. Zatriawati

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.06 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, selamat sore, salam sejahtera. Kita akan mulai lagi pemeriksaan ... sidang pemeriksaan pendahuluan pada sore hari ini. Demi efisiensi akhirnya, Bapak-Bapak, Ibu, kami gabungkan sekalian 10 orang jadi tadinya ada ... masih ada 2 kloter tersisa. Tapi demi efisiensi waktu, kita gabungkan persidangannya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat dan Bapak-Bapak yang giliran terakhir juga tidak lama menunggu. Tapi dengan risiko ya begini, mohon dimaklumi karena ruangnya kecil, berdesak-desakan sedikit ... sedikit berdesak-desakan, ya. Ya karena mungkin Bapak dan Ibu-Ibu ini terbiasa bersidang di ruang yang di bawah yang agak lega, di sini mungkin terasa RSS gitu ya, Ruang Sangat Sempit, begitu. Ya, tapi begitulah keadannya.

Pada sore hari ini, kita akan memeriksa 10 permohonan, dan yaitu Permohonan Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, partai apa ... Perkara Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gol ... Golkar, kemudian Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, kemudian ini ... itu untuk Sulawesi Utara, ya.

Kemudian yang Sulawesi ... yang berkait Sulawesi Tengah, Partai Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Berkarya ... Beringin Karya, kemudian Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hanu ... Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), kemudian Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang, 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lagi, kemudian part ... 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya).

Sebelum kita memulai persidangan, saya persilakan dulu untuk memperkenalkan diri satu per satu mulai dari Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, silakan! Siapa yang jadi juru bicara? Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I WAYAN SUDIRTA

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb. Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I WAYAN SUDIRTA

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namu Buddhaya. Kami Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari 3 orang, saya sendiri, I Wayan Sudirta. Yang kedua, Marks Phillian. Yang ketiga, Jemmy Mokolensang. Terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Pak Wayan. Kemudian dari Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum DPP Partai Amanat Nasional selaku Pihak Pemohon dalam Register Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dengan juru bicara, saya sendiri Surya Imam Wahyudi S.H., M.H. didampingi rekan saya R.A. Shanti Dewi Muliaharjani, S.H., M.H., Jubir, S.H., dan Andi Muhammad Yusuf, S.H. terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dari Partai Golongan Karya apakah sudah hadir? Dari Partai Golkar Permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum? Kemudian, dari Partai Demokrat Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Belum? Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ya, silakan! Siapa yang hadir?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Saya dari Partai Demokrat atas ... sebagai Kuasa Hukum Yandri Sudarso.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sendiri, Pak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Hadir di sini sendiri bersama Prinsipal, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, bersama Prinsipal?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kemudian Perkara 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Berkarya? Belum hadir. Kemudian part ... Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa? Ya, silakan! Perkenalkan diri dulu, Pak.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera. Selamat sore buat kita semua. Dari Partai Kebangkitan Bangsa dikuasakan kepada kami, Yang Mulia. Yang hadir sekarang ini, ada saya sendiri Ade Yan Yan H.S., ada juga di belakang Teja Sukmana dan untuk pemberitahuan untuk kita semua, Yang Mulia. Untuk perkara PKB, ada juga pengacara yang di samping saya untuk internal. Mungkin bisa perkenalkan diri langsung!

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Baik, Yang Mulia. Untuk perkara internal atas nama Syarif Hidayatullah, dikuasakan kepada kami. Saya hadir bersama ... saya bernama Dendy Zuhairil Finsa bersama rekan saya, Friska Gultom ada di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ya, dari Partai Hanura Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Om swastiastu.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Dari Perkara Nomor 32 hadir Kuasa Hukum Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil II. Saya sendiri, Slamet Santoso, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Slamet Santoso, Anda Advokat?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Belum, Yang Mulia.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, belum. Ya, kalau Advokat harus pakai itu soalnya ... harus pakai toga. Kemudian, dari Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan Bintang? Ya, silakan perkenalkan diri dulu!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Kami selaku Kuasa Hukum dari Partai Bulan Bintang yang hadir di sini adalah saya selaku Juru Bicara, Meizaldi Mufti, S.H. dan didampingi oleh rekan saya, Pak H. Yasin.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Wah, Pak Yasin sekarang di belakang, kemarin di depan, ya? Terima kasih, Pak. Senyumnya masih ... masih menarik. Walaupun saya lihat lelah juga seperti kami, ya?

Kemudian Perkara 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lagi, siapa yang juru bicara?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik. Assalamualaikum wr. wb

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Untuk Perkara 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya atas nama Ridwan Darmawan, yang di belakang ada Pak Jellij Dondokambey, S.H.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Demikian. Terima kasih.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Yang terakhir dari Partai Gerindra, Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Perkenalkan saya Saleh Hidayat, selaku Kuasa Hukum Pengganti karena Kuasa Hukum yang mendaftarkan perkara mengundurkan diri, Yang Mulia.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksudnya pengganti itu, Anda masih tetap apa namanya ... sudah ada kuasanya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ada.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi waktu permohonan belum disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Belum disampaikan.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh nanti sekarang ini sudah ada, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ada.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon, Petugas diambil ininya ... surat kuasanya!

Baik, terima kasih. Sekarang kepada Termohon dulu, memang walaupun sudah ada perwakilan tetap sejak pagi tapi ada perubahan namanya.

Silakan! Siapa lebih dulu?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wb

54. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO

Perkenalkan saya Remana Nugroho selaku Kuasa Hukum dari Termohon dalam Perkara Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dihadiri pula prinsipal Bapak Viryan.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya (...)

56. KUASA HUKUM TERMOHON: REMANA NUGROHO

Terima kasih.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Viryan datang dari pagi itu. Ya, silakan! Siapa lagi?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: SETYA INDRA ARIFIN

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami Kuasa Hukum KPU Republik Indonesia dari Kantor Absar Kartabrata Law Firm. Menangani perkara berkenaan dengan Sulawesi Tengah. Yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: SETYA INDRA ARIFIN

147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Baik.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: SETYA INDRA ARIFIN

Terus bersama kami juga selain Komisioner KPU RI. Datang juga dari Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Naharuddin. Terima kasih.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana? Pak Naharuddin mana? Oh, ya ya. Silakan!

Ya, silakan! Masih ada? Termohon? Matikan dulu, Mas, satu ini!
Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Hadir bersama kami Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Yessy Momongan. Untuk Register Perkara 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai PAN dan register Perkara 184-03-25/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners. Saya Asep Andryanto bersama rekan advokat Febi Hari Oktavianto. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, masih ada dari Termohon?

Ya, silakan!

66. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Masih ada, Yang Mulia.

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

68. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Assalamualaikum wr. wb.

69. KUASA HUKUM TERMOHON: ADE SONATA

Assalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: ADE SONATA

Perkenalkan kami Kuasa dari oh maaf ... bersama (...)

72. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, giliran dulu. Sesama bus kota dilarang saling mendahului.
Ya, silakan!

73. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa Hukum dari Sulawesi Tengah, Partai Berkarya Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Nama Saya Muhammad Ridwan Saleh, hadir bersama saya Greta Santismara, S.H. Dan tadi sudah disebutkan hadir dari KPU RI dan Pak Nazaruddin dari Komisioner Divisi Hukum.

74. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

75. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD RIDWAN SALEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

76. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.
Silakan, lanjut!

77. KUASA HUKUM TERMOHON: ADE SONATA

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

78. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.

79. KUASA HUKUM TERMOHON: ADE SONATA

Saya Ade Sonata dari HICON untuk sebagai Kuasa Termohon untuk Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

80. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

81. KUASA HUKUM TERMOHON: ADE SONATA

Terima kasih.

82. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sama siapa bersama hadir? Sendiri?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: ADE SONATA

Sendiri.

84. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, sendiri. Oh, ya.
Kemudian dari Pihak Terkait dulu. Silakan! Siapa saja?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TOTOK PRASETIYANTO

Terima kasih. Selamat sore.

Kami dari Partai Golkar, Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hadir saya sendiri Totok Prasetyanto. Terima kasih.

86. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Lanjut!

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DENNY KAUNANG

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua.

88. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Salam.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENNY KAUNANG

Saya Denny Kaunang dari PDI Perjuangan ... Kuasa dari PDI Perjuangan untuk Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Ya, silakan lanjut!

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Partai Nasdem untuk Perkara 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang hadir adalah saya sendiri Taufik Basari, kemudian Rahmat Taufit dan Revin E. D. Rompas.

92. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI

Untuk kasus dengan Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir Azriadi Bahri Malewa, Rahmat Taufik, dan saya sendiri Taufik Basari. Terima kasih, Yang Mulia.

94. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Taufik Basari, ya. Ada lagi masih? Ada mungkin di belakang, ya? Silakan! Itu mohon miknya. Ya.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Assalamualaikum wr. wb.

96. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Saya sendiri Kuasa Hukum dari P3. Nomor Pokok Perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Terima kasih, Yang Mulia.

98. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk pihak?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Atas nama Erfandi.

100. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk Perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Siap.

102. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Masih ada?

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Ada, Majelis.

104. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Assalamualaikum wr. wb.

106. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Kami dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Pihak Terkait Partai PDI Perjuangan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKB.

108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan?

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

110. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Terima kasih.

112. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti, ini untuk PKB, ya?

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Ya.

114. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Dan Ahmar Ihsan Rangkuti.

116. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hah?

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Putusan Nomor 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Ahmad Rangkuti.

118. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, yang ... yang hadir di belakang, ya?

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86-03-26 DAN 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANISTYA K. DEWI

Ya.

120. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

Sudah semua ya untuk Pihak Terkait? Nah, sekarang Bawaslu dulu!

121. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Bawaslu, saya Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Hadir juga pada persidangan ini Bawaslu Sulawesi Utara, Ketua Herwin Malonda, dan anggota Supriyadi Pangellu dan Awaludin Umbola, serta Bawaslu Sulawesi Tengah, Ketua Ruslan Husen, dan Anggota Zatriawati. Terima kasih, Yang Mulia.

122. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sudah semua memperkenalkan diri. Nah, maka sekarang kita mulai dengan Perkara Nomor 81/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu.

Silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak perlu dibacakan semua karena kita semua sudah menerima yang tertulis. Cukup poin yang menjadi titik sentral dari permohonan yang menjadikan alasan mengapa kemudian Saudara meminta hal yang disampaikan di dalam petitem permohonan. Ya, begitu. Silakan!

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Baik.

124. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Pokok permohonan Perkara Nomor 81/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bahwa perolehan suara Pemohon di dapil kota mana ... Kota Manado Dapil IV adalah 9.036 suara, sementara Pihak Terkait yaitu Partai Golkar 3.051 suara. Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Kota yang dimiliki Pemohon yang menjadi Bukti P-4 dan P-5 dalam permohonan, perolehan suara Golkar di TPS 4 Kelurahan Masing Kecamatan Tuminting berbeda dengan Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon. Detailnya kami sudah sampaikan, Yang Mulia.

Kemudian sebagai perbandingan, kami akan sampaikan bahwa perolehan suara Pemohon dan menurut Model C-1 DPRD Kabupaten Kota dan Model DAA ... DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota. Partai Golkar Model C-1=1, di Model DAA=1. Kemudian ada suara atas nama Calon Ridwan Marlian menurut Model C-1 itu=9, kemudian berubah di Formulir Model DAA-1 menjadi=19. Bertambah 10 suara. Kemudian jumlah suara sah parpol dan calon di TPS 06 Kelurahan Maasing tersebut menurut Model C-1=29, kemudian Menurut DAA menjadi=39 suara. Terjadi penambahan 10 jumlah suara untuk Partai Golkar.

Kemudian, Yang Mulia, kami sampaikan bahwa secara keseluruhan berdasarkan Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota di atas, Termohon melakukan perubahan suara untuk Partai Golkar dari 322 menjadi 377 suara. Sehingga Termohon melakukan penambahan suara untuk Partai Golkar sebanyak=55 suara.

Kemudian, Yang Mulia, kami sampaikan juga bukti-bukti terkait dengan perolehan suara yang tadi kami sebutkan. Bahwa penambahan atau penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara tersebut telah memengaruhi hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Kota Manado daerah pemilihan IV. Dimana total perolehan suara Partai Golkar di daerah tersebut sejumlah=3.051 suara yang seharusnya adalah=20 ... dua ri ... yang seharusnya adalah=2.996 suara.

Bahwa penambahan suara Partai Golkar tersebut telah mengakibatkan hilangnya perolehan kursi ke 7 DPRD yang seharusnya menjadi milik Pemohon. Demikian pokok-pokok permohonannya, Yang Mulia. Kami akhiri men ... dengan petitum.

Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian membatalkan Keputusan Termohon Nomor sekian dan seterusnya. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:

- Partai PDI Perjuangan=9.036 suara, dan
- Partai Golkar=2.996 suara.

Yang keempat, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

126. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Singkat, padat, tapi jelas.

Yang Mulia, ada catatan?

Kalau dari saya ada catatan pertanyaan saja. Kalau dari jumlah suara yang Saudara persalkan itu, katakanlah dijumlahnya memang

kemudian menjadi milik Saudara itu, itu memadai untuk memperoleh 1 kursi apa ndak?

Itu kenapa penting kami tanyakan, itu kan nanti katakana ... ada ... ada kaitannya dengan persoalan signifikansi, kan? Gitu.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Ya, betul, Yang Mulia. Memadai (...)

128. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gitu, ya ... begitu, ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Betul, Yang Mulia.

130. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya cuman mau menanyakan itu saja.

Kemudian untuk selanjutnya kita akan ada kesa ... ya, kesalahan ketik sederhana sih sebenarnya. Kalau biasanya menulis dapil itu kan pakai angka arab, kan? Bukan pakai angka romawi gitu, ya. Ya itu standar saya kira, Pak Phillian juga mungkin sudah anu itu, ya. Gitu ya, ini ya.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Baik, Yang Mulia. Nanti kami (...)

132. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu ... ya, kita anggap sudah dianulah. Sudah dipahami itu. Tapi itu penting supaya nanti kalau beruntun misalnya dengan angka romawi berikutnya kan bisa ... bisa membingungkan. Alat bukti yang disampaikan itu ada 2 kali penyampaian alat bukti, ya?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Benar, Yang Mulia.

134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang pertama itu P-1 sampai dengan P-17, betul?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Betul.

136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu sudah semua kami vi ... verifikasi, tidak ada masalah sehingga bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang penyampaian berikutnya itu P-18 dan P-19, ya?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULYADI MARKS PHILLIAN

Benar, Yang Mulia.

138. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu juga sudah kami verifikasi. Sudah bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, dengan demikian untuk PDI Perjuangan Sulawesi Utara untuk Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai. Untuk yang berikutnya, untuk Partai Amanat Nasional, mohon berkenan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Siapa kan ... yang akan menyampaikan untuk Partai Amanat Nasional, Perkara 121? Silakan seperti tadi teman yang dari PDIP supaya singkat, padat!

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Kami akan menyampaikan pokok-pokok per ... permohonan tentang Perkara PHPU Nomor 121/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk pengisian kursi Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Sulawesi Utara pokok permohonan bahwa telah terjadi perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPR RI di daerah Sulawesi Utara, antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Nasdem yang ditetapkan oleh Termohon, yang sangat merugikan Pemohon, sebagaimana dalam tabel berikut ini yang dalam persandingannya ini saya rincikan saja. Nasdem itu ... apa namanya ... dari Termohon itu 248.666 sedangkan versi Pemohon adalah 243.598, sehingga ada selisih penambahan suara untuk partai Nasdem sebesar 5.068 suara.

Kemudian adanya pengurangan untuk Partai Amanat Nasional atau Pemohon dari versi Termohon yaitu 80.732 suara yang seharusnya menurut Pemohon adalah 81.216 suara, sehingga berkurang ada sebesar 484 suara.

Kemudian secara singkat kami sampaikan bahwa kami mendalilkan telah terjadi penambahan atau penggelumbungan suara sebagaimana angka yang telah ditabelkan di atas itu dan termasuk juga mendalilkan adanya pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan di atas itu.

Kemudian, Yang Mulia, izinkan kami ... beberapa hari ini kami konsultasi ke MK untuk menyerahkan daftar alat bukti yang cukup banyak, dari P-1 sampai dengan P-344. Namun sampai dengan pagi tadi, pada akhirnya sampai tadi siang sebelum sidang kesini, kami diminta untuk menyerahkan daftar bukti dan verifikasi di depan Majelis, Yang Mulia dalam persidangan ini. Untuk itu kami mohon berkenan untuk diterima daftar bukti kami dan dinyatakan sah sebagai daftar bukti dalam pengajuan permohonan ini (...)

143. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, sebentar dulu, coba nanti untuk urusan daftar bukti belakangan, ya?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Siap, Yang Mulia. Selanjutnya kami (...)

145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Izinkan menyampaikan Petitem, Yang Mulia?

147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Petitem?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Petitem berdasarkan (...)

149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, langsung mau Petitem?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya, karena secara singkat saya tadi menggambarkan bahwa ada 3 poin yaitu ... apa (...)

151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Ya, tapi (...)

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Pengurangan suara yang diantaranya penggelumbungan untuk Partai Nasdem. Yang kedua, pengurangan untuk Partai Amanat Nasional yang dilihat dari tabelnya itu adalah ... apa namanya ... sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak usah saya sebutkan lagi (...)

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Sehingga kaitannya dengan bukti yang di ... disarankan oleh dari pihak kementrian untuk disampaikan di muka persidangan agar bisa disahkan di persidangan. Sehingga kami langsung masuk ke Petitum, Yang Mulia.

155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dulu, Anda jangan buru-buru dulu.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Siap.

157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda itu kan menyerahkan daftar bukti yang baru, itu kan kemudian menyertakan juga Petitum, kan?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya, Yang Mulia.

159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksudnya apa ini? Apakah kemudian Petitum ini yang mau Anda bacakan? Apa tetap ada yang melekat pada perbaikan permohonan?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Begini, Yang Mulia. Kalau yang di Petitum yang diajukan sebelumnya itu adalah hitungan yang pada saat itu kami punya buktinya. Yang saat ini kan bukti ini terus didapat dan akhirnya sampai dengan persidangan ini (...)

161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya itu ... semua itu kan ada limit waktu, range waktu, yang menjadi tahapan-tahapan (...)

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya.

163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda kemudian tidak bisa menambah bukti tapi di situ diboncengkan Petitum.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya, berarti buktinya saja. Mohon izin, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Buktinya bisa kami pertimbangkan (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Inggih, Inggih.

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Petitum (...)

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda mengikuti Petitum yang melekat diperbaiki (...)

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Siap. Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Silakan bacakan Petitum yang itu!

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Berdasarkan ... Petitum.

Berdasarkan argumentasi hukum di atas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan autentik yang akan diajukan dalam persidangan ini sebagai daftar bukti maka kami mohon kepada Yang Mulia dengan perkara itu untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi seperti berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permintaan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU dan seterusnya khususnya untuk pengisian Keanggotaan DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Kumdia menyatakan menurut hukum hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan sua ... pemilihan ... Daerah Pemilihan Sulawesi Utara sebagai berikut, sebagaimana yang tadi telah disampaikan.

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Yang Mulia Majelis, berpendapat lain kami mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Terima kasih, Yang Mulia.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kalau yang kemudian yang Minahasa enggak dibacakan atau dianggap dibacakan?

Kan, ada permohonan yang tersendiri yang berkaitan dengan Dapil Minahasa Utara, apa sudah dianggap dibacakan?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dibaca?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya, ya.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, silahkan nanti KPU dan ... apa ... dan Bawaslu serta Pihak Terkait untuk merespons.

Baik, untuk yang ... sudah ini yang dibacakan, dianggap dibacakan 2 bundel ini. Meskipun dapilnya berbeda ya, tapi tetap dianggap dibacakan ya?

Baik, cuma ... cuma supaya diketahui oleh Pihak Termohon dan Pihak Bawaslu serta Pihak Terkait bahwa bundel yang tidak dibacakan berkaitan dengan Dapil Minahasa Utara ... Minahasa Utara III DPRD Kabupaten.

Pak Ketua, mungkin bisa meneruskan ini, untuk pengesahan bukti.

180. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ya, jadi gini ... apa ... kami juga memerlukan kejelasan, ya. Itukan ada soal Dapil Kabupaten Bolaamongondo dan Sulawesi Utara itu yang Anda sampaikan di sana, itu sumir sekali ya? Jadi, apakah ... gimana maksudnya itu?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Izin, Yang Mulia.

182. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Karena setelah saya baca kemarin kita periksa itu. Jadi, untuk ... apa namanya ... Bolaang Mongondow itu kebetulan karena tidak ada petitum tentang menyangkut ... apa namanya ...

184. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu (...)

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Perolehan suara yang benar, maka itu kami cabut, Yang Mulia dalam persidangan ini.

186. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu maksudnya. Oh, jadi itu dicabut. Mohon dianu ya, Termohon itu dicabut.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Dicabut, untuk Bolaang Mongondow, Yang Mulia.

188. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya, yang ada adalah untuk DPR RI Sulawesi Utara dan Minahasa Utara III, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia tadi saya lupa.

190. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Itu jadi, bisa dicatat sama yang anu dan pihak.

Itu kenapa saya perlu tegaskan itu? Karena untuk kejelasan nanti apa yang mau ditanggapi. Kemudian yang jadi yang dianu tadi Dapil DPRD Provinsi atau gimana itu?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Dapil DPR RI untuk Provinsi Sulut sama Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara, yang diajukan dalam permohonan persidangan ini, terima kasih.

192. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itukan jelas. Jadi, ndak ada ... tidak ada dapil untuk DPRD Provinsi bukan, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

194. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu ... itu juga perlu karena kalau ada untuk dapil provinsi harus disebutkan kan gitu, ya?

Nah, ini ... oke. Jadi, memang ada di halaman 4 dari permohonan tadi juga ada pernyataan-pernyataan yang agak membingungkan itu, yaitu ada yang tertuliskan Kabupaten Kota Minahasa itu ada beberapa kali diulang-ulang itu ... itu gimana itu?

Jadi, apakah itu berarti yang sudah anu ... yang sudah dianggap dibacakan tadi itu, ya? Nah, baik kalau begitu.

Nah, kemudian sekarang mengenai tadi daftar bukti sudah dijelaskan. Jadi, bukti itu harus ditampilkan apa adanya tidak boleh ada penafsiran-penafsiran bukti itu. Penafsiran bukti itu 1 adalah kewenangan kami di Mahkamah dan Anda mengaitkan bukti itu adalah dengan rujukan pada dalil. Misalnya dalilnya mengatakan begini (bukti P

sekian) itu saja. Jadi, kalau dibuktinya sendiri tidak boleh ditambahkan penafsiran sendiri. Itu anunya, sudah sempat disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Kemudian, ini berkaitan dengan surat kuasa, ya. Prosedur itu Anda menyampaikan Surat Kuasa Tanggal ... dengan Nomor 20/PAN seterusnya 2019 pada tanggal 23 Mei 2019 untuk permohonan PPHU 2009 ... 2019 untuk Dapil Minahasa Utara III, betul? Betul. Tetapi kemudian ada juga Surat Kuasa Khusus Nomor 18 Tahun 2019 bertanggal 23 Mei, yang Anda serahkan pada pukul 23.40 WIB juga untuk Permohonan PPHU khusus Dapil Sulawesi Utara untuk pengisian kursi DPR RI, benar ini?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Benar, Yang Mulia.

196. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ini apa ya ... karena ... oh, tadi sudah jelas ya. Jadi, untuk Minahasa Utara III itu yang berlaku surat kuasa tersendiri begitu?

Oke. Baik, kalau begitu tidak ada persoalan. Nah, sekarang pengesahan alat buktinya.

Bukti ... daftar bukti P-1 sampai dengan P-33 ... ini bukti yang sudah ada dulu, ya. Nah, bukti itu sudah kami verifikasi tapi kemudian apakah bukti itu hanya berlaku untuk Bolaang Mongondow III? yang P-1 sampai dengan P-33 itu

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Izin, Yang Mulia. Bolaang Mongondow tadi sudah diminta untuk dicabut, Yang Mulia.

198. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, berarti bagaimana kedudukan ini yang makanya saya ... saya tanyakan itu ... itu pertanyaan kedua. Karena berkait dengan itu, apakah kemudian Bukti ini akan dicabut? P-1 sampai P-33 itu?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Sepanjang untuk dapil kabupaten (...)

200. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sepanjang yang menyebut Bolaang Mongondow, begitu?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya. Kabupaten, Yang Mulia.

202. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu berarti ... hah?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Untuk Daftar Bukti Kabupaten Bolaang Mongondow, Yang Mulia.

204. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu di ... dicabut, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Dicabut, ya. He eh.

206. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, nanti pengesahannya akan berlaku begini, P-1 sampai dengan P-33 disahkan kecuali yang menyangkut Bolaang Mongondow. Begitu jadinya, ya?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya, Yang Mulia.

208. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Itu anunya.
Nah, itu. Ya. Baik kita sahkan (...)

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Izin, Yang Mulia ... Yang Mulia, yang diajukan hari ini apakah tambahan (...)

210. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu (...)

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ndak, maksudnya (...)

212. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami verifikasi dulu. Enggak bisa langsung disahkan. Nanti diserahkan dulu.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya.

214. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan catatan itu tadi. Penafsiran-penafsiran itu tidak berlaku, ya.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Siap. Siap.

216. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, yang tadi itu disahkan dulu, kecuali yang menyangkut Bolaang Mongondow, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Dapil Sulawesi Utara untuk DPR. Ini terjadi ada perbedaan, ya? Yang P-1 sampai P-10 itu ada perbedaan antara Daftar dengan nama alat bukti ... daftar nama alat bukti dengan bukti fisiknya. Nanti tolong diselesaikan dulu, ya.

Nah, karena itu belum bisa kami sahkan itu da ... yang bukti P-1 sampai dengan P-10 itu, ya. Nanti diselesaikan dengan penomoran yang daftar bukti tambahan itu.

Kemudian yang Dapil Minahasa Utara III yang tadi dianggap sudah disertai, dianggap dibacakan itu kan? Nah, itu saya mau konfirmasi ... kami mau konfirmasi, itu buktinya P-1 sampai dengan P-33? Nah, itu sudah kami verifikasi dan sudah bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk P-1 sampai dengan P-6 ini yang masih ada kaitan dengan itu juga, untuk DPRD kabupaten itu di Minahasa Utara III itu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Itu masih ada perbedaan alat bukti dengan bukti yang disampaikan. Jadi ... dan itu juga belum Anda beri tandai itu. Kami menyebutnya istilah kuping itu disampingnya, itu ya. Itu belum diberi tanda itu, tolong nanti di ... di ... diselesaikan dulu.

Dengan demikian, ini kami tunda pengesahannya dulu, ya. Sekalian nanti. Baik, dengan demikian, untuk Partai Amanat Nasional selesai dan selanjutnya, apakah dari Partai Golkar sudah datang?

Oh, ada surat? Rupanya ada pencabutan ini, ya. Oh, ya, kami menerima surat bahwa untuk Partai Golkar Nomor ... untuk Permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ternyata dicabut atau ditarik. Jadi, dari Termohon ini siapa yang berkaitan dengan itu?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Kami, Yang Mulia.

218. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan menarik napas bahagia, ya!

219. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ANDRYANTO

Alhamdulillah.

220. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini permohonannya dicabut ini untuk dapil itu.

Ya, itu. Kemudian, sekarang dari Partai Demokrat, apakah sudah hadir? Yang 67/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Oh, ya yang tadi Bapak sendiri itu, ya? Ya, yang Bapak.

Ya, silakan, Bapak mohon berkenaan, Yang Mulia, Pak Wahiduddin untuk memimpin kali ini!

221. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan, dari Demokrat, siapa yang akan menyampaikan? Sama seperti yang lain, ya. Hal-hal yang perlu terkait dengan dalil (...)

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Assalamualaikum wr. wb.

223. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kami di Sulawesi Utara mengajukan ada ... ada 2 permohonan, Yang Mulia. Pertama di Kotamobagu dan yang kedua di Minahasa Selatan. Kami bacakan ya, Yang Mulia, permohonannya.

Permohonan ini adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tahun 2019. Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Kemudian, mengenai kedudukan juga kami anggap dibacakan.

225. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Mengenai tenggang waktu, kami anggap dibacakan.

227. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian, mengenai pokok permohonan. Untuk pokok permohonan. Dapil I Kotamobagu atas nama Saudara Ishak R Sugeha Nomor Urut 1 DPRD Kotamobagu.

Pertama, kami mohon izin untuk ada sedikit renvoi, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan! Yang di mana? halaman?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Di Petitemnya itu, kami (...)

231. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 10, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Jadi, itu salah ketik, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ini, PSU-nya itu di Desa Tumobuo, Kotamobagu Timur ... Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu

235. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan TPS 1 Desa Rantau Bintungan aslinya?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

PSU-nya di TPS 156, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, diubah begitu?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia. Jadi, ini salah ketik (...)

239. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Direnvoi? (...)

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Salah ketik waktu ... karena mengingat waktu, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Provinsi Kalimantan Timur ini memang.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, coba!

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi (...)

245. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bunyinya bagaimana?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, di ... diganti ... direnvoi TpS 1, TPS 5, TPS 6 Desa Tumobuo.

247. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Desa Tumobuo.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kecamatan Kotamobagu Timur.

249. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kotamobagu Timur.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kotamadya Kotamobagu.

251. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kotamobagu, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, kemudian di awal permohonan itu ada sedikit kami tambahkan itu tentang DB-1-nya, Yang Mulia, mengenai persandingan suara.

253. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman berapa itu?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Halaman pertama, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, persandingan suara antara pem ... pemo ... persandingan suara menurut Termohon, gitu, Yang Mulia.

257. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Ya.
Halaman 1?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

259. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini yang di perbaikan, ya?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

261. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang 31 Mei?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

263. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di mana? Di judul atau di perihal? Perihal?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Di ... di awal ... awal pernyataan, Yang Mulia.

265. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Awal pernyataan itu (...)
Yang bertanda tangan di bawah ini Prof. Dr. H. Susilo Bambang
(...)

266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak ada awal pernyataan.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Oh. Bukan, Yang Mulia. Di bagian pokok permohonan, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Halamannya ... halaman 9, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok halaman 1 tadi?

272. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak, jangan-jangan kampung halamannya lupa juga, ya?

273. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan! Yang mana ini?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kami menambahkan di situ mengenai persandingan suara menurut Termohon, Yang Mulia. Menurut Termohon itu Caleg Nomor 03

suaranya 697 suara. Sementara, Caleg Nomor 01=529 suara. Jadi, ada selisih 168 suara.

275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau ini ... izin, Pak Wahid. Di ... Anda langsung narasikan saja kemudian (...)

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, ya.

277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya? Ini kan permohonan Saudara Cuma 2 lembar kan itu.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Siap, Yang Mulia.

279. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung petitum aja.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Baik, Yang Mulia. Pokok permohonan kami ini adalah bahwa menurut Termohon itu, suara dari Pemohon adalah 529 suara. Kemudian, suara Caleg Nomor 3 yang pemegang kursi itu=697 suara. Jadi, ada selisih 168 suara. Menurut Pemohon, sebetulnya suara Pemohon ini bisa melebihi suara Caleg Nomor 3 dikarenakan bahwa di dalam (...)

281. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini di mana ini? Kok di kita tidak ada ini, halamannya coba! Halaman berapa itu?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Itu poin yang ... itu yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia. Itu mau ditambahkan, Yang Mulia.

283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambah angka maksudnya? Ini kan Anda ... angka itu muncul di petitem, di posita tidak ada.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, makanya (...)

285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dimasukkan di ... di paragraf di alinea mana maksudnya?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Di alia ... di alinea pertama, mau kami tambahkan tadi. Saya sampaikan bahwa (...)

287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, kan?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ... alasan sebagai berikut. Coba mau ditambah apa maksudnya?

290. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Coba coba! Ya, ya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, mau kami tambahkan di awal ... awal pernyataan itu, Yang Mulia, di awal bagian pokok permohonan. Bahwa menurut Termohon suara Caleg Nomor 3 itu 697 suara.

292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

967?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Kemudian, suara Caleg Nomor 01, yaitu Pemohon=529 suara. Sehingga, selisihnya ada 168 suara, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

967, ya?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

697, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

697. Selisihnya jadi?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

168 suara, Yang Mulia. Jadi, itu poin yang kami tambahkan, Yang Mulia.

298. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu saja.

299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Teruskan!

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Saya coba sampaikan pokok permohonan bahwa sebagaimana persandingan suara yang sampaikan tadi dan selisih suara 168 suara itu. Menurut Pemohon suaranya melebihi sebetulnya dari Caleg Nomor 3. Itu dikarenakan bahwa di dalam proses pencalegan itu telah terjadi adanya pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Dimana pelanggaran dan kecurangan tersebut sudah dilaporkan ... sudah disampaikan keberatannya mulai dari tingkat kecamatan. Namun, di tingkat kecamatan hanya disuruh mengisi DA-2.

Kemudian setelah itu ditanya bagaimana perkembangannya. Hanya dijawab, nanti di kabu ... di kota. Akhirnya waktu di kota, Pleno kota juga disampaikan keberatan juga tidak ada (...)

301. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini enggak ditulis di sini?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ada, Yang Mulia.

303. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di mana itu?

304. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di mana itu?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Itu di halaman 9 itu, Yang Mulia. Cuma ini mengingat kata-katanya, susunannya memang amburadul, Yang Mulia.

Memang ini karena waktu itu banyak permohonan yang masuk. Ya, kebetulan saya juga bukan yang menulis ini, Yang Mulia (...)

306. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, ya.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

... ada tim ... tim dari kami, Yang Mulia.

Jadi karena mengingat banyak laporan yang masuk, jadi hanya seperti ini, Yang Mulia. Tapi, poinnya ada di sini sebetulnya, Yang Mulia. Cuma tidak pakai nomor. Gitu, Yang Mulia.

308. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu bisa salah alamat nanti, Pak, kalau ndak pakai nomor. Nyasar suratnya nanti itu.

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, makanya.

Tapi, poin-poin yang saya sampaikan itu ada di sini, Yang Mulia. Di halaman 9 itu.

310. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, coba.

Langsung saja petitum. Ya, nanti kita apa ... cermati lagi. Silakan!

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, artinya (...)

312. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ke petitum aja!

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Petitum, Yang Mulia?

314. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Petitemnya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian yang kedua memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 1, TPS 5, TPS 6, Desa Tumobuy.

316. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ganti dari Kalimantan Timur ini, ya?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.
Desa apa?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Desa Tumobuo.

320. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, yang tadi itu ya di depan?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, Oke.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Mohon maaf, Yang Mulia. Pemungutan suara ulang bukan penghitungan, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, pemungutan suara ulang?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Ya, Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

Ayo, silakan! Sudah selesai?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Sudah ... sudah, Yang Mulia.

Yang kemudian permohonan yang kedua, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Permohonan yang kedua atas nama Eske Kontu Caleg Kota/Kabupaten Minahasa Selatan 3, Sulawesi Utara. Poin dari permohonan ini, lebih kurang sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa menurut Termohon, suara Caleg Nomor 1 atas nama Rommy Poli dari Partai Golkar sebanyak 200 ... 2.172 suara.

330. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian suara Termohon atas nama Eske Kontu sebanyak 1.976 suara.

332. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, ada selisih 169 suara, Yang Mulia.

Menurut Pemohon bahwa suara Pemohon itu melebihi suara dari Caleg Nomor Urut 1. Dikarenakan bahwa di dalam proses pemilu ini terjadi pelanggaran dan kecurangan. Yang mana pelanggaran-pelanggaran ini sebetulnya sudah dilaporkan ke KPU. Sudah disampaikan dan sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu sudah merekomendasikan untuk melakukan PSU.

Namun KPU dengan alasan waktu, waktunya dan logistiknya, akhirnya tidak melaksanakannya.

334. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada lampiran? Dari (...)

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ada buktinya, Yang Mulia.

336. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

... dari Bawaslu buktinya?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian bukti berapa itu? (...)

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Sebetulnya juga akhir-akhir ini juga setelah pemilihan proses ... setelah pencobololan sebetulnya sudah juga rekomendasi Bawaslu yang

diajukan oleh partai lain. Itu juga tidak dilaksanakan oleh KPU, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukannya rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Tompasobaru? Bukan?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, bukan Bawaslu kan, ya?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

344. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Panwascam.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Yang di kecamatan, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Mohon maaf, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, jadi rekomendasi PSU-nya itu untuk PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara.

350. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian TPS 4 di Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru. Itu, Yang Mulia.

352. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, menurut Pemohon kalau seandainya PSU ini dilaksanakan, ya, suara Pemohon akan melebihi suara Caleg Nomor Urut 1 (...)

354. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

... Saudara Rommy Poli, Yang Mulia

356. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, langsung ke petitem. Kan begitu?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Berdasarkan itu, petitem dari kami, dari Pemohon adalah:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Kemudian,

2. Memerintahkan kepada KPUD Minahasa Selatan untuk melakukan penghitungan. Jadi mohon maaf itu ada "pemungutan" itu "penghitungan", Yang Mulia. Penghitungan suara ulang di 3 TPS tadi, Yang Mulia. TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan, dan Desa ... TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

360. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

362. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Ini untuk Kuasa Hukumnya masih banyak yang belum tanda tangan. Pak Utomo Karim, Richard Faisal, Ardian Hamdani, Reinhard Romulo, Jansen, Asdar, Agatha Lidyawati, Pangihutan, Rony Eli Hutahaean belum tanda tangan. Ini masih (...)

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, mohon maaf, Yang Mulia. Jadi memang kami kuasanya memang ada tim. Jadi timnya itu ada 18 orang (...)

364. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi masih ... masih (...)

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Tapi tiap ... setiap kasus itu ada yang me-handle 1 atau 2 orang. Kebetulan yang ini cuma saya yang handle-nya, Yang Mulia.

Jadi untuk perkara ini, kuasa hukumnya hanya saya sama teman yang ada tanda tangan kalau enggak salah ada 2, kalau enggak salah, Yang Mulia.

366. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di sini ada 5 (...)

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUD`ARSO

5, ya. Ada 5 itu, Yang Mulia.

368. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi khusus untuk perkara ini kuasanya yang ber-5 ini?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

370. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Ya, silakan!

371. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

372. TERMOHON: VIRYAN

Yang Mulia.

373. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

374. TERMOHON: VIRYAN

Dari Termohon.

375. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

376. TERMOHON: VIRYAN

Terkait dengan yang Kotamobagu yang tadi disampaikan itu. Kami pelajari, apa yang disampaikan tadi sebagai penambahan ini hal yang berbeda dengan permohonan yang disampaikan.

377. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya baru mau mem ... mengatakan itu (...)

378. TERMOHON: VIRYAN

Siap, Yang Mulia.

379. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan ... jadi karena ada penambahan itu kami sudah tahu bahwa itu akan direaksi oleh Termohon, begitu kan? Tetapi kan berikan dulu kesempatan kepada Pemohon menyampaikan itu. Silakan nanti ditanggapi itu! Dan memang ada banyak juga hal yang perlu mendapatkan perhatian, ya.

Banyak yang tidak cocok, Pak. Antara vide yang ditunjuk dengan yang ditunjuk itu berbeda, gitu loh. Bapak nunjuk ini Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo tahu-tahu yang muncul lok ... itu ... yang ditunjuk orang lain. Atau bahkan be ... benda, gitu loh. Itu di ... di bukti-buktinya, Pak. Itu ... itu nanti di ... apa namanya ... yang perlu disesuaikan.

Tetapi begini, banyak ... ada bukti yang Bapak sampaikan itu untuk Kotamobagu saya mau cross-check dulu. Bukti P-14.1 sampai dengan P-14.20, betulkah? Ini sudah kami (...)

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Betul, Yang Mulia.

381. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah kami verifikasi dan kami serahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Dapil Minahasa Selatan III, P-14.1 sampai dengan P-14.6, benar?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Benar, Yang Mulia.

383. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah tapi yang P-14.6 nya ini yang saya katakan itu nunjuknya salah itu. Yang tidak sesuai dengan daftar buktinya. Jadi fisiknya tidak sesuai dengan daftar buktinya. Nanti di ... di inikan, Pak ... di ... di ... di selesaikan, ya.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Yang Mulia, sudah ada. kami bawa sebetulnya. Tadi karena enggak sempat, jadi (...)

385. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu nanti selebihnya ... selebihnya dari ... selain dari P-14-6 itu, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang khusus P-14.6 yang tidak sesuai dengan fisiknya nanti di ... disertakan, ya.

Baik. Dengan demikian, terima kasih.
Silakan!

386. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang 5 kuasa hukum tadi, ya. Ini belum menyatakan kan ... kartu tanda pengenal (...)

387. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh iya, itu.

388. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Belum, ya?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Siap, Yang Mulia. Akan di sto ... setor, Yang Mulia.

390. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu penting loh, Pak. Saya sering dari pagi mengingatkan itu karena belum menyerahkan tanda bukti advokat. Kan nanti Yang Mulia Pak Suhartoyo be ... persidangan kembali juga mengingatkan. Kalau Bapak bukan advokat kan pakai jubah itu ... toga itu kan enggak boleh di situ. Juga kalau ndak ... bukan kuasanya bahkan duduk di situ pun tidak boleh, gitu, ya (...)

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Mohon maaf, Yang Mulia (...)

392. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak usah ditanggapi itu ... ndak. Ini nanti dilengkapi saja ininya.

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kebetulan kami sudah 3 kali pileg menghadiri ini, Yang Mulia.

394. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu tidak ada yang meragukan. Tetapi kita berbicara tentang hukum acara, gitu kan. Kalau tidak disertakan, mungkin Bapak saja memang manis, tapi kan bagaimana? Kalau ndak ada ta ... kartu tanda pengenalnya di tempat kami, gitu loh. Gitu ya, Pak, ya?

Jadi itu, ya, jadi nanti mohon dilengkapi. Terima kasih, Yang Mulia, untuk demokrat dengan demikian selesai, maka selanjutnya saya minta Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memimpin sidang berikutnya.

Berkarya sampai hari ini ... sampai saat ini tidak hadir. Berarti sekarang adalah Partai Kebangkitan Bangsa.

Silakan, Yang Mulia!

395. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Berkarya supaya yang dijadikan rujukan untuk representasi yang permohonan ... perbaikan permohonan 23 Mei, ya. Yang kami register tanggal 1 Juli. Siapa yang mau menyampaikan? Apa? hidupkan miknya!

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Izin, Yang Mulia. Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa.

397. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya, baik (...)

399. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang dibacakan perbaikan permohonan yang Anda ajukan tanggal 23 Mei, kami terima 30 Mei, kami register 1 Juli, ya? Itu yang kami registrasi.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, Yang Mulia.

401. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Mohon izin, saya akan membacakan pada pokok-pokoknya saja permohonan. Yang tertulis di sini, yang lainnya kami anggap dibacakan. Pokok-pokok ... dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang kami ajukan, yang pertama itu mengenai DPR RI untuk Dapil Sulawesi Tengah dimana perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon itu memperoleh=95.900, sementara menurut kami seharusnya 9 ribu ... 95.975. Sedangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera=96.004, menurut kami Pemohon=95.729.

Perselisihan tersebut dikarenakan di dalam perhitungan Termohon terdapat penambahan dan pengurangan terhadap suara Partai pk ... pengurangan terhadap suara partai pk ... PKB, dan penambahan suara PKS. Adapun pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Donggala sebanyak 14 suara, dianggap dibacakan. Berikutnya itu ... bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kota Palu sebanyak 32 suara, sedangkan untuk penambahan suara di kota ... di Kabupaten Donggala ... sebentar, Yang Mulia. Saya baca yang pokoknya saja.

Penambahan suara PKS di Kota Palu itu sebanyak 112 suara, sedangkan penambahan di kota ... di Kabupaten Donggala untuk perolehan suara PKS itu ... pengurangan ... sebanyak 14 suara. Selanjutnya untuk DPRD (...)

403. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kita urutkan, ya? Diurutkan, diurutkan.

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik (...)

405. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Meskipun yang dibaca per-tabel itu cuman angka-angka, tapi supaya sistematis.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik. Jadi kami ulangi, Yang Mulia. Untuk ... sebagai urutan yang ada dalam kami itu, berdasarkan pertama untuk penambahan Kabupaten

Donggala, itu penambahannya sebanyak ... pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Donggala sebanyak 14 suara. Sedangkan untuk penambahan perolehan suara Keadilan Sejahtera di Kabupaten Donggala itu sebanyak 35 suara.

Berikutnya, untuk di Kota Palu, penambahan perolehan ... pengurangan sua ... perolehan suara Pemohon di Kota Palu itu sebanyak 32 suara, Yang Mulia. Sedangkan untuk penambahannya itu ada sekitar 112 suara.

407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

112? Di halaman berapa itu?

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Di halaman ... sebentar ... 36, Yang Mulia.

409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

36?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya. Dari mulai halaman 36. Berikutnya, Yang Mulia, untuk DPRD Kabupaten Donggala III, bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon ... terjadi di Dapil Donggala III sebanyak 5 suara ... untuk DPRD Kabupaten Donggala III, Yang Mulia, sebanyak 5 suara. TPS 2 Desa Tovia, Tambu, TPS 3 Desa Malei, TPS 3 Desa sima ... Sima Gaya, Kecamatan Balaesang. TPS 3 Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata. Bahwa penggelembungan perolehan suara Partai Golongan Karya di Dapil Donggala III yaitu sebanyak 22 suara yang tersebar di TPS 1 Desa Dampal, Kecamatan Sirenja. TPS 1 Desa Malino, TPS 4 Desa Lombonga, TPS 3 Desa Tovia, Kecamatan Balaesang.

Bahwa di dalam pelaksanaan pemilihan, Yang Mulia. Di TPS 03 dan TPS 05, Termohon telah menghi ... menghentikan pemilihan dikarenakan alasan bahwa yang habis itu adalah kertas suara pemilihan untuk Pilpres, tapi semua akhirnya anggota ... pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kabupaten Provinsi, DPRD prov ... RI dan DPD itu dihentikan oleh Termohon meskipun kertas suaranya ada.

Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut jelas merugikan Pemohon karena sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara baik untuk DPRD Kabupaten maupun DPRD RI. Oleh karena ... Oleh karenanya, kiranya Majelis Hakim berkenan ... untuk dilakukan pemilihan

PSU di TPS 03 dan TPS 05 Desa Ketong, Kecamatan Balaesang. Berikutnya, ke Petikum, Yang Mulia?

411. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sebentar.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya?

413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desa Ketong, Kecamatan Balaesang, ya? Di TPS 03, 05 ya?

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Betul, Yang Mulia.

415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang diminta PSU?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya.

417. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya kami ingat, kalau mau mengabulkan nantikan

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Siap, Yang Mulia.

419. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau mau ... jangan senang dulu.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, baik, Yang Mulia.

421. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya lingkari ini, saya lingkari dengan spidol besar.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Izin, Yang Mulia. Untuk melanjutkan

423. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, petitum. Silakan!

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Untuk Pemilihan DPR RI dan DPR ... DPRD Kabupaten Donggala, untuk pemilihan Donggala III.
3. Menetapkan perolehan suara dalam pemilihan DPR RI Daerah pemilihan Sulawesi Tengah sebagai berikut: pertama, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara 95.975, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 95.729.
4. Menetapkan peroleh suara dalam pemilihan DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala III, sebagai berikut:
 1. Partai Kebangkitan Bangsa 7.057.
 2. Partai Golongan Karya 2.336.
5. Menetapkan Risharyudi Triwibowo, sebagai Calon Legislatif DPR RI PKB daerah pemilih Sulawesi Tengah sebagai anggota DPR RI terpilih.

6. Menetapkan Muhammad Yasin, Se. M.E. Calon Anggota Legislatif Kabupaten Donggala Daerah pemilihan Donggala III sebagai Anggota DPR Kabupaten Donggala terpilih.
7. Memerintahkan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpadangan lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

425. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi, dari permohonan ini ... di apa ... diinventarisir ada beberapa yang perlu.

Ini untuk DPR RI dapil Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Dapil Donggala III, ini permohonan kan pure kan diajukan partai, itu permohonan perseorangan Syarif Hidayatullah (...)

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Hadir, Yang Mulia.

427. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil Donggala IV.

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Hadir, Yang Mulia.

429. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan hadir apa tidak, maksudnya ini berarti 1 permohonan ini mencakup 2 karakter, gitu?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Ya, beda ... beda kuasa hukum yang pegang, Yang Mulia. Untuk (...)

431. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Dapil Donggala IV belum di sampaikan?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Donggala 4 belum disampaikan.

433. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, sori. Jadi, yang partai tadi, ya?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Ya.

435. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil Sulawesi Tengah dan Donggala, ya?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Ya, Yang Mulia.

437. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Silakan kalau begitu yang Dapil Donggala IV.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Dapil Donggala 4, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaannirrahiim. Perbaikan permohonan ATP Nomor 26401 kami anggap dibacakan,

IV. bahwa adapun pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh kepada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Donggala, dapil Donggala 4 dari internal partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

Bahwa suara pemohon hilang sebanyak=2 suara pada waktu rekapitulasi tingkat kecamatan suara tersebut berpindah menjadi suara partai pada saat rekap tingkat kecamatan. Dimana suara Pemohon hilang=2 suara partai mengalami penambahan=2 suara. Tabel yang kami sajikan persandingan rekap tingkat Kecamatan Sojol, Kabupaten

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan DA-1 kecamatan Sojol khususnya untuk Desa Siboang. Partai kebangkitan bangsa persi Pemohon itu 32 di Desa Siboang. Versi Pemohon di Desa Siboang adalah 30, ada selisih 2 suara.

Pihak Terkait ada Burhanuddin, Caleg Nomor Urut 1 Desa Siboang versi Termohon=25, versi Pemohon=25.

3. Pemohon Syarif Hidayatullah Caleg Nomor Urut 2 Desa Siboang versi Termohon=12, versi Pemohon=14, ada selisih 2.

Berdasarkan persandingan data di DAA-1 Kecamatan Sojol suara Pemohon untuk Desa Siboang yang seharusnya 10 suara akan tetapi di DAA-1 Kecamatan Sojol, untuk Desa Siboang suara Pemohon hanya ditulis 8. Sehingga suara Pemohon hilang 2. Hilangnya suara Pemohon tersebut karena adanya penambahan suara partai, di mana suara partai di Desa Siboang harusnya 30 akan tetapi ditulis dalam DA-1 menjadi 32, sehingga suara partai mengalami kenaikan 2 suara secara tidak sah. Bukti P-2.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Siboang berdasarkan DAA-1 adalah=10, relahan tersebut sama dengan DAA-1 milik Termohon.

439. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 9, yang paling atas yang kemudian partai ... suara partai di DA-1 Desa Siboang adalah=30, gimana? 10 apa 14?

440. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baris pertama itu loh.

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAILIL FINSA

Baris pertama, Yang Mulia.

442. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 9.

443. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Anda narasikan di tabel tidak ini?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAILIL FINSA

Halaman 9, ya?

445. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Loh, Anda yang baca kok malah Anda yang membingungkan diri, bagaimana?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Siboang berdasarkan DA-1 adalah 14. Ya. Ya, tadi saya salah baca, Yang Mulia. Baca resume. Maaf, Yang Mulia. Tadi baca resume.

447. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lanjut.

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Perolehan tersebut sama dengan DAA-1 Desa Siboang milik Termohon. Sedangkan suara partai di DAA-1 Desa Siboang adalah 30. Perolehan tersebut sama dengan DAA-1 Desa Siboang milik Termohon.

Bahwa ada suara caleg dalam 1 partai atas nama Burhanuddin, Caleg Nomor 1 mengalami kenaikan sebanyak 1 suara, yaitu di TPS 12 Desa Ogoamas pada saat rekapitulasi suara untuk Desa Ogoamas. Tabel Persandingan Rekapitulasi Suara Desa Ogoamas 1 ... Ogoamas 1, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan DAA-1 Desa Ogoamas 1, Kecamatan Sojol Utara, khususnya untuk Desa Siboang (Bukti P-5).

Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Termohon di TPS 12=4. Pemohon di TPS 12=4. Selisih=0. Caleg Nomor Urut 1, Burhanuddin Termohon (...)

449. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

TPS 12=17, Pemohon=16. Selisih=1.

Syarif Hidayatulah, Nomor Urut 2. Termohon=17. Pemohon=17. Selisih=0.

451. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Bahwa berdasarkan C-1 TPS 12 Desa Ogoamas 1, suara Caleg Nomor Urut 1, Burhanuddin adalah 16 suara. Akan tetapi pada waktu rekap Desa Ogoamas 1, suara Caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin menjadi 17 atau naik 1 suara di DAA-1 Desa Ogoamas 1.

Berikut, kami sampaikan perolehan suara yang benar untuk C-1 TPS 2 (...)

453. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibaca yang berkaitan saja.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Baik, Yang Mulia.

455. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Burhanuddin=16.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

1. Burhanuddin=16.
2. Syarif Hidayatullah=17.

457. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

17, oke.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Persandingan rekap suara Ogoamas, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan DB-1. Termohon ... versi Termohon Partai Kebangkitan Bangsa=546, Pemohon=564. Selisih=2.

Burhanuddin, Termohon=962. Pemohon=961. Selisih=1.

Syarief Hidayatullah versi Termohon=962. Versi Pemohon=964. Selisih=2.

Bahwa dengan adanya perubahan perolehan suara partai dan caleg Nomor Urut 1 Burhanuddin mengalami kenaikan dan hilangnya suara Pemohon serta kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Donggala, Dapil IV dari internal Partai Kebangkitan Bangsa.

459. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini rangkumannya ini kan?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Ya, Yang Mulia.

461. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baca tidak? Burhanuddin seharusnya=961. Syarif=964.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Burhanuddin seharusnya=961. Syarif=964.

463. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke dianggap dibacakan. Petitumnya?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya, sepanjang perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah sepanjang Dapil IV.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala IV, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah atas nama Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., dari Partai Kebangkitan Bangsa.

465. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Apalagi?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Baik, Yang Mulia.

467. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Cukup.

469. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ini yang saya tanyakan dari awal tadi bahwa yang baru saja dibacakan kan permohonan perseorangan atas nama Syarif Hidayatullah, kan?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Ya, Yang Mulia.

471. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala IV.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Dapil Donggala IV.

473. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini prinsipalnya tidak hadir?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Prinsipalnya tadi terlambat masuk.

475. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terlambat masuk. Ini kan permohonan yang diajukan partai tapi Anda sisipkan atau apa maksudnya kemudian ada juga perorangan, kalau perorangan kan mestinya ada rekomendasi dong?

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Persetujuan, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

477. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada? Ada?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Ada.

479. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk Pak Syarif ini?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Ada, Yang Mulia.

481. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada. Oh, jadi ini hanya untuk ... apa ... untuk pertimbangan kepraktisan jadikan satu. Tapi kuasa hukumnya tidak sam ... tidak, bedakan?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Beda, Yang Mulia.

483. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak beda tapi ter-cover semua enggak yang ditandatangani di sini?

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Kalau yang di ini dari DZ Finsa And Partners. Kalau yang di Pak Syarief Hidayatullah (...)

485. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Beda, ya?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Beda, Yang Mulia.

487. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke karena ini permohonan juga berbeda. Tapi, surat kuasa tidak ada lampiran kartu advokat, ya. Betul, ya?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Surat kuasa memang belum dilampirkan kartu advokat (...)

489. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan surat kuasanya, Kartu Pengenal Advokat. Anda Advokat, bukan?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Advokat, Yang Mulia.

491. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Peradi?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Peradi.

493. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

KAI?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Peradi, Yang Mulia.

495. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Peradi yang mana dulu?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Peradi Soho.

497. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sama saja itu. Oke. Syamsul Huda Yudha belum ada tanda tangan dalam Surat Kuasa. Masih eksis atau ini sudah?

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHAIRIL FINSA

Izin, Yang Mulia. Ini bukan di kita ini, Yang Mulia.

499. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini yang di parpol.

500. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, di parpol.

501. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, yang bisa menjawab temannya yang 67 tadi.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, Yang Mulia.

503. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana Syamsul Huda belum tanda tangan?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Nanti disuruh melengkapi, Yang Mulia.

505. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilengkapi, ya?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Siap, Yang Mulia.

507. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ada orangnya?

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Orangnya enggak, Yang Mulia karena kebetulan dia PJ-nya untuk yang Jawa Timur, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi, sesungguhnya begini supaya teman-teman lawyer itu tahu. Meskipun Anda itu terbagi dalam beberapa penugasan, itu tetap satu permohonan itu kalau memang itu satu Surat Kuasa dan di depan ... di depan ini Anda membubuhkan bahwa yang dapat Suarat Kuasa itu adalah teman-teman secara keseluruhan, ya di sini seharusnya tanda tangan semua. Soal kemudian di persidangan untuk Panel 1 ini misalnya

A dan B, kemudian dibagi Panel 2, C dan D, itu persoalan teknis dan itulah yang kemudian Anda ter-cover dengan adanya bersama-sama maupun sendiri-sendiri itu.

Jadi, ketika Anda hanya berdua bisa menggunakan media sendiri-sendiri itu, tidak harus bersama-sama. Tapi, kalau Anda lupa menyebutkan dalam Surat Kuasa itu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, ya kemana-mana harus Anda rombongan itu. Ya.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, Yang Mulia.

511. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kan ada resiko-resiko yudisial, kan begitu. Itu bukan sesuatu yang sederhana, lho. Makanya, jangan kemudian seperti yang dari tem ... bapak yang dari ... karena dibagi tugas terus hanya 2 yang tanda tangan dipandang sudah cukup, tidak. Tetap semua harus tanda tangan, kemudian soal hadir di persidangan, itu kemudian ada pembagian tugas, itu beda persoalan. Untuk ... mungkin tinggal bukti, Yang Mulia.

512. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon dari PKB yang Parpol?

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya, Yang Mulia.

514. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba lihat halaman 11! Halaman 11, awas jangan sampai nyasar ke kampung halaman orang lain!

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Siap.

516. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Angka 4-nya mohon dibaca! Angka 4!

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Empat puluh suara ... bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 40 suara (...)

518. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar! Itu 40 itu didapat dari mana? Tabel di atasnya berapa?

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Enam belas, Yang Mulia.

520. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, banyak itu nambahnya dari 16 ke 40 itu.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Sebentar sebentar, Yang Mulia. Oh 13 (...)

522. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu asli penggelembungan itu (...)

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Salah nulis, Yang Mulia.

524. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha? Yang benar berapa? 40 apa 16?

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Sebentar, Yang Mulia.

526. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu kan logi ... logi ... loginya, kan Anda turunkan dari kolom di atasnya itu, kan?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Oh ... dari yang B itu, Yang Mulia, yang betul itu adalah harusnya perolehan suara sebanyak 13 suara, Yang Mulia.

528. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

13 suara.

530. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tiga belas?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Bukan. Maksudnya, 40 ... 16 ... 29 harusnya, Yang Mulia.

532. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lho, dari ... bagaimana itu maksudnya?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Yang Mulia, itu kan dalil. Pertama, di ba ... di TPS 1 Desa Malonas, kami dalilkan dalil u ... utamanya itu, Kecamatan Dampelas terdapat pengurangan perolehan suara sebanyak 13 suara dikarenakan ada uraian yang di bawahnya, di sini memang ada kesalahan (...)

534. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang benar berapa di angka 40 itu? 40 itu seharusnya angka berapa itu?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Empat puluh itu harusnya, sebentar sebentar, Yang Mulia.

536. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan bingung-bingung, lho. Nanti bingungnya itu ... konsekuensinya ke honor itu. Bisa jadi horor nanti.

Kalau kami memahami ini, Anda turunkan dari tabel yang di atasnya, bukan? Ndak?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya, Yang Mulia. Di atasnya itu ... di awal itu ... di tabel awal, Nomor 1 itu Risharyudi Tribwibowo harusnya 18. Nah, sementara di tabel yang kedua itu tertulis Rishadi Tribowo 8 suara. Jadi, mungkin ada kesalahan typo harusnya 10, Yang Mulia.

538. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Harusnya?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Di sini untuk poin 4, nama Risharyudi ... pengurangannya itu ... itu di poin a nya itu, Calon Nomor Urut 03 atas Risharyudi Tribwibowo 10 suara sebelumnya dalam Model C-1 DPR-RI. Nah, justru harusnya tertulis 18 malah tertulis 10. Terus, ini uraian yang 13 suara itu, Yang Mulia.

540. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya. Oke.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Dari 40 itu mungkin 10.

542. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya cuma ingin anunya aja ... bahwa melihat logic angkanya itu dari mana datangnya gitu? Nah, jadi ben ... benarkah angkanya begitu? Atau gimana?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Salah. Yang Mulia, itu.

544. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Yang 40 itu salah, Yang Mulia.

546. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang benar adalah?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Yang benar itu untuk poin ke-4 itu harusnya 10, Yang Mulia.

548. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

10? Jangan berubah lagi, lho! Ya?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Benar benar, Yang Mulia.

550. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini saya seperti kemarin bilang, kayaknya Anda kelemahan matematikanya sama dengan saya dapat nilai 6 dulu. Ya, Bapak sudah ditemukan?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Sudah, Yang Mulia. Itu kan ada pengurangan-pengurangan. Nah, untuk poin ... itu harusnya bukan 40, Yang Mulia. Tapi turunan dari yang dalil B itu, yang di atas itu kami ... secara garis besar itu 13 suara.

552. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

13?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya. 10 itu pengurangan terhadap Trisadi ... Risharyudi Triwibowo. Nah, sisanya itu ada pengurangan untuk Adriyanto 1(...)

554. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, oke, oke.

Jadi, sekarang jadi jumlah itu berapa jadinya? Yang di angka 4 itu? Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak ... itu berapa di situ?

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Sebanyak (...)

556. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Angka 40 itu loh yang saya tanyakan.

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Sebanyak ... sebentar, Yang Mulia.

558. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini yang buat permohonan siapa ini?

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Kawan, Yang Mulia.

560. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Rupanya berita kepada kawan ya jadi anu.

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Harusnya, Yang Mulia, itu 16, Yang Mulia.

562. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

16, Yang Mulia.

564. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

16.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya, karena lagi menjelaskan bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 16 suara dalam Model DAA-1, Yang Mulia.

566. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, sudah pasti, ya?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Pasti, Yang Mulia.

568. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau nanti berubah lagi (...)

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Gak akan saya ganti lagi, Yang Mulia.

570. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, gitu dong. Ya, 16 ya.

Baik, terima kasih. Saya cuma konfirmasi itu. Sekarang ke langsung ke bukti sebelum pindah ke pemohon ... Pemohon yang lain. Ini gara-gara urusan matematika ini lama juga kita tertunda ini.

Saudara Pemohon, untuk Dapil RI ... Dapil Sulawesi Tengah, itu menyertakan bukti yang kami terima di Mahkamah itu bukti P-1 sampai dengan P-37. Betul?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Betul, Yang Mulia.

572. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul.

Tapi ada catatan banyak ini untuk Anda ini. Untuk daftar bukti P-2 yang Anda beri tanda bukti P-2C dan kemudian diberi judul di situ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58 dan seterusnya. Ternyata di bukti fisiknya, itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309.

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

P-2C, ya?

574. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-2C.

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, Yang Mulia.

576. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti diinikan.

Lalu di nomor ... di bukti P-4. Anda menyebut Keputusan KPU Nomor 1129 dan seterusnya. Di bukti fisiknya tidak ada. Kemudian, bukti P-5. Anda menyebutkan bukti KPU Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD, dalam Pemilihan Umum 2019. Bukti fisiknya juga ndak ada.

Kemudian, buk ... itu bukti yang P-5 ya, yang P-6-nya Anda beri judul Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, fisiknya juga tidak ada.

Ini, saya jadi ingat dengan Ghost Rider-nya Pak Taufik Basari ini, peace, Pak. P-14 itu anda judulnya membandingkan C-1 DPR dan DAA-1 di TPS 4, Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah. Itu di bukti fisiknya tidak ada bukti DAA-1.

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

DAA-1.

578. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

Lalu, P-21 itu membandingkan C-1 situng KPU dan C-1 partai ... partai TPS 14, Desa Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Ternyata di bukti fisiknya itu membandingkan C-1 DPR TPS 14, Desa Lolu Selatan dan DAA-1 DPR, Desa Lolu Selatan. Itu nanti di ... diinikan, disesuaikan. Kalau memang tidak ada bukti fisiknya, dicabut.

Kemudian P-29. Itu membandingkan C-1 situng dan DAA-1 TPS 2, Desa Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Itu di bukti fisiknya tidak ada DAA-1 yang anda sebut itu.

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

DAA-1. Siap.

580. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian juga P-33. Menyebut DAA-1, TPS 38, di bukti fisiknya tidak ada DAA-1 itu. P-34 juga begitu, tidak ada DAA-1.

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

P-34.

582. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-36 juga begitu, tidak ada DAA-1.
Ya, itu untuk DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, ya?

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik.

584. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, dari P-1 sampai dengan P-37 itu. Yang bermasalah dalam pengertian seperti tadi itu ada 10 bukti. P-2C, P-4, P-5, P-6, P-14, P-21, P-29, P-33, P-34, P-36.

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Baik, Yang Mulia.

586. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang "bermasalah" dalam tanda petik itu belum bisa kami sahkan.

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Siap.

588. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Selain itu kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Donggala, Dapil Donggala ... Donggala 3. Siapa yang menangani ini? Masih Saudara kah?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya, Pak. Masih.

590. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu buktinya P-1 sampai P-20? Benar, ya?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Ya, Yang Mulia.

592. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar? Jangan berubah lagi.

Nah, benar ya? Nah, ini catatannya begini. Bukti P-11 itu tidak ada bukti fisiknya. Yang Anda katakan di situ Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan seterusnya, itu fisiknya tidak ada.

Demikian juga P-12. Yang disebut sertifikat C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, itu juga tidak ada bukti fisiknya. Kemudian, P-18. P-18 disebutkan di daftar bukti itu Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan seterusnya. TPS 003 Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung ... Belesang Tanjung.

Ternyata di dalam bukti fisiknya itu adalah Model A-3 KPU TPS 003 Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung ... Balaesang Tanjung. Yang sama cuma Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung. Yang sama cuma TPS 3 Desa Ketong keca ... kecamat apa ... Kecamatan Balaesan Tanjunganja saja, yang depannya beda.

Lalu P-19 di daftar bukti Anda menyebutkan Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat, dan seterusnya TPS 005 Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung ternyata yang di bukti fisiknya adalah Model A-3 KPU TPS 005 Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung. Nanti disesuaikan, ya.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Siap, Yang Mulia.

594. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, jadi dari P-1 sampai dengan 20 itu, jadi untuk P-11, P-12, P-18, P-19 yang permasalahannya seperti tadi belum bisa kami sahkan, ya. Sisanya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Sementara untuk kabupaten ... untuk Dapil Donggala IV, P-1 sampai dengan P-6 tidak ada masalah, jadi kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya.

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHARIL ISHAK

Yang Mulia.

596. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHARIL ISHAK

Kami juga ada tambahan bukti baru nanti bisa (...)

598. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nanti bisa sekalian dengan ini di ... di belakang (...)

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHARIL ISHAK

Baik.

600. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan ... kalau itu kan kalau memang terpisah, Anda perbaikannya kan nanti di belakang, ya.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DENDY ZUHARIL ISHAK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Kami juga ada tambahan. Mohon izin, Yang (...)

603. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, nanti sekalian di ini ... kan sekalian diverifikasi, ya.

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADE YAN YAN H. S.

Siap, Yang Mulia, siap.

605. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dengan demikian untuk PKB sudah selesai pemeriksaannya. Sekarang adalah giliran dari Partai Hati Nurani Rakyat. Silakan!

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk mengkonfirmasi bahwasanya kami setelah berkoordinasi dengan prinsipal caleg, itu per tanggal 5 Juli kemarin memasukkan surat permohonan pencabutan perkara, Yang Mulia.

607. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Itu yang kami mau konfirmasi. Memang kami sudah menerima.

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Ya. Yang Mulia.

609. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Siapa Termohon untuk ini? Hanura! Yang untuk perkara yang ini?

Nah, senyum, Pak. Sudah damai suratnya itu. Ya, itu. Jadi sudah dicabut, ya?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Sudah dicabut, Yang Mulia.

611. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya ... ya ... itu karena kami juga su (...)

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SLAMET SANTOSO

Sekalian mohon izin untuk tidak perlu dibacakan lagi, Yang Mulia.

613. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh begitu? Ya. Memang apa yang mau dibacakan lagi maksudnya. Dibacakan untuk dicabut kan itu ... itu sama dengan lagu itu ... pergi untuk kembali itu. Ya, ya.

Baik, kalau begitu selanjutnya adalah Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Bulan Bintang.

614. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan! Siapa?

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Assalamualaikum wr. wb.

Yang mlea ... Yang Mulia Majelis, sebelum saya membacakan Permohonan, ada pesan dari salah satu rekan kita yang memang sangat perlu untuk disampaikan di sini menurut beliau (...)

616. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yaitu?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Bahwa rekan kita yang bernama Gugum Riko ... Ridho Putra, S.H., M.H., mencabut kuasa, Yang Mulia.

618. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, Gugum?

619. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini ndok ... di Nomor 2, ya?

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, Yang Mulia.

621. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

1. Firmansyah
2. Gugum Ridho Putra

622. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu Gugumnya ndak ikut lagi sebagai kuasa?

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Enggak ikut sebagai kuasa.

624. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh. Baik.

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Dengan alasan faktor profesional sebagai advokat, katanya.

626. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa?

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, dengan alasan faktor profesional saja.

628. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Profesional saja? Apa ya kira-kira artinya. Ya sudahlah, ndak usah dibahas.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, mungkin ... mungkin.

630. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan diberi penafsiran begitu dulu. Lain itu.

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Silakan, Yang Mulia. Maaf.

632. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan dibacakan pokok-pokoknya!

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Baiklah, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada Permohonan ini kami menyampaikan sengketa atas 2 Daerah Pemilihan DPRD di Provinsi Sumo ... Sulawesi Tengah. Pertama, PHPU DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Terus yang kedua, PHPU DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Untuk Permohonan ... untuk PHPU Kabupaten Parigi Moutong, sebelumnya kami ingin menyampaikan renvoi, Yang Mulia.

634. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Silakan!

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Sebelum kami ... di awal Permohonan, kami menyampaikan perolehan suara Pemohon (...)

636. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman berapa itu?

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Sebentar, Yang Mulia.
Halaman PMB ... Halaman 6, Yang Mulia.

638. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Dalam Permohonan kemarin kami menuliskan bahwa perolehan suara menurut Termohon=1.963. Yang kami renvoi adalah perolehan suara menurut Pemohon. Kami hanya menambahkan 1 suara di situ.

640. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di sini=3.292?

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya. 3.292, akan kami ubah menjadi 3.292.

642. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh.

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Dan selisihnya juga otomatis berubah, Yang Mulia. Berubah 1 suara. Menjadi 1.330.

644. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Yang Mulia Majelis Hakim?

646. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Bahwa mengenai selisih 1.330 suara di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon yang tersebar di 4 kecamatan dan desa serta TPS. Jadi yang pertama, telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Siniu sebanyak 106 suara.

648. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Itu terdiri dari berkurang 7 ... 27 suara di Desa Silanga.

650. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Yang kedua, berkurang 21 suara di Desa Silanga Barat.

652. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Terus berkurang 18 suara di Desa Uevolo.

654. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Terus yang ke empat berkurang sebanyak 16 suara di Desa mara ... Marantale.

656. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Selanjutnya berkurang 24 suara di desa tanda ... Tandaigi. Terus, terjadi lagi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ampibabo sebanyak 380 suara. 380 suara ini tersebar di 15 tempat. Masing-masing di Desa Sidole Barat, Desa Toga ... kalau di Desa Sidole Barat kita berkurang sebanyak 2 suara. Terus di 39 ... berkurang 39 di Desa Toga. Terus berkurang 48 suara di Desa Ogolugus, terus berkurang lagi sebanyak 15 suara di Desa Sidole Timur, berkurang juga 33 suara di Desa Lemo, berkurang 66 suara di Desa Buranga, berkurang 15 suara di Desa Ampibabo, berkurang 53 suara di Desa Ampibabo Utara, berkurang sebanyak 15 suara di Desa Lemo Utara, berkurang sebanyak 16 suara di Desa Ampibabo Timur, berkurang 14 suara di Desa Paranggi, berkurang sebanyak 52 suara di Desa Tolole, berkurang sebanyak 6 suara di Desa Sidole, berkurang sebanyak 9 suara di Desa Tolole Raya, berkurang (...)

658. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 21 itu, ya? Halaman 21 ya? Ya, silakan!

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Yang saya bacakan Resume Permohonan, Yang Mulia. Jadi (...)

660. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Tapi tetap mengacu terhadap Permohonan (...)

662. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Terus terjadi lagi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Parigi Selatan sebanyak 390 suara.

664. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Pertama berkurangnya, berkurang 70 suara di Desa Boyontongo. Kedua, berkurang sebanyak 40 suara di Desa Dolago. Ketiga, berkurang sebanyak 74 suara di Desa Dolago Padang. Keempat berkurang sebanyak 14 suara di Desa Masari. Kelima, berkurang sebanyak 18 suara di Desa Sumber Sari. Keenam, berkurang sebanyak 58 suara di Desa Namba ... Nambaru. Tujuh, berkurang sebanyak 57 ... 56 suara di Desa Tindaki. Berkurang sebanyak 20 ... berkurang sebanyak 27 suara di Desa Olobaru. Sembilan, berkurang sebanyak 8 suara di Desa Gangga. Dan sepuluh, berkurang sebanyak 25 suara di Desa Lemusa.

Terus terjadi lagi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Parigi sebanyak 53 suara, Yang Mulia.

666. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya?

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Itu berkurang sebanyak 18 suara di Desa Lebo. Kedua berkurang sebanyak 21 suara di Desa Bambalemo Ranos. Ketiga, berkurang sebanyak 37 suara di Desa Bambalemo, berkurang sebanyak 68 suara di Desa Kampal, berkurang sebanyak 86 suara di Desa Masagi, berkurang

sebanyak 42 suara di Desa Loji, berkurang sebanyak 56 suara di Desa Maesa, berkurang sebanyak 43 suara di Desa Mertasari, berkurang sebanyak 49 suara di Desa Pombalowo dan berkurang sebanyak 34 suara di Desa Olaya.

668. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Ya, persandingan halaman 5 (...)

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Itulah inti dari permohonan untuk DPRD Parigi Moutong, Yang Mulia, ya?

670. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Selanjutnya mengenai PHPU DPRD Kabupaten Morowali Utara, Dapil Morowali Utara I.

672. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, persandingan ini (...)

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ada persandingan perolehan suara antara Partai Bulan Bintang dengan Partai Nasdem.

674. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Kalau menurut Termohon, Partai Nasdem itu memperoleh suara 3.911.

676. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Tapi kalau menurut versi Pemohon, Partai Nasdem itu seharusnya memperoleh suara 3.768, jadi ada (...)

678. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3.000 ... 3.706 ini? Halaman 52.

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

3.000 (...)

680. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, di Permohonan ini.

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Oke, siap, Yang Mulia. Nanti kita (...)

682. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3.706 menurut Pemohon, Termohon=3.911

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Oke, sementara mengacu pada Permohonan ini, Yang Mulia.

684. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Terus perolehan Partai Bulan Bintang kalau menurut Termohon memperoleh=1.228

686. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Kalau menurut Pemohon=1.260 (...)

688. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

1.312

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Berarti direnvoi, Yang Mulia. Kalau udah berubah terus (...)

690. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi ini yang direnvoi?

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, dua-dua tadi ya (...)

692. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berapa? Satu dua? (...)

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Termasuk selisihnya juga. Jadi kalau versi Pemohon ... untuk Partai Nasdem 3.000.000 ... delapan (...)

694. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3.768?

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

He eh, jadi selisihnya jadi=143.

696. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Terus, untuk Partai Bulan Bintang versi Pemohon=1.260.

698. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, jadi selisihnya=32.

700. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Nah, terhadap selisih suara di atas dikarenakan adanya, pertama, terjadinya penambahan terhadap suara Partai Nasdem, sebanyak=143 suara, yaitu pertama di TPS 05 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur sebanyak 11 suara.

702. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kalau di sini 205.

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Yang mana? Yang barusan atau yang persandingan?
Pada TPS 05?

704. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

143 suara.

706. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di sini 205.

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Berarti direnvoi, Yang Mulia. Yang ini, yang kami bacakan sekarang.

Ya, Yang Mulia. Eh, 143 suara, Yang Mulia.

708. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tadi sudah. Sudah ... sudah, tadi sudah di 143, 205 selisihnya, ya.

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Jadi, 143 suara ini terjadi karena pada TPS 05 Desa Bungintimbe Partai Nasdem mendapat penambahan sebanyak=11 suara, pada TPS 03 Kelurahan kolono ... Kolonodale, Kecamatan Petasia sebanyak ... dapat penambahan suara=36 suara.

710. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Ada perubahan enggak dari sini? Kalau tidak ada perubahan, ya cukup ini kan uraiannya saja.

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Oke. Terus (...)

712. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Petitum saja.

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

He eh.

714. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Petitum. Atau ada hal terjadi pengurangan (...)

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ada pengurangan juga terhadap suara Partai Bulan Bintang sebanyak=32 suara. Mungkin nanti ...

Terus atas Permohonan ... atas Posita tersebut kami mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mohon dikabulkan Permohonan.
2. Mohon dibatalkan Putusan KPU Nomor 987 sepanjang untuk pengisian KAP ... pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong daerah Parigi Moutong III ... Daerah Pemilihan Parigi Moutong III, terus (...)

716. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Parigimutung 3 atau 1? Kalau disini Parigi Moutong 1.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

1, Yang Mulia.

718. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Salah ketik, ya.

720. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang benar, 1? Ya, ya.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, 1, Yang Mulia.

Terus sepanjang ... sepanjang untuk menetap ... apa ... membatalkan juga Keputusan KPU 987 sepanjang Dapil Pemilihan Parigi Moutong 1 dan dapil pa ... Dapil Morowali Utara I. Terus menetapkan hasil perolehan suara untuk partai Bulan Bintang di Parigi Moutong sebanyak=3.253 suara.

722. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berapa?

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

3.253 suara.

Berikut tabel perolehan partai yang lain (...)

Siap, Yang Mulia.

Terus mohon penetapan juga terhadap ... untuk Daerah Pemilihan Morowali Utara, menetapkan perolehan suara Partai Nasdem sebesar=3.768 suara (...)

724. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3.768 bukan 3.706 ya? Coba Partai Bulan Bintang (...)

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Untuk perolehan Partai Bulan Bintang menjadi=1.260.

726. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

1.260. Ya, sama kayak yang di depan tadi. Oke, sudah?

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ada sedikit lagi, Yang Mulia. Mungkin ada renvoi yang mau disampaikan yang lain.

728. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Untuk ... untuk halaman 51, Yang Mulia. Kami akan merenvoi TPS-nya, tapi berhubung ini temen nyoretnya agak sedikit berlebihan jadi agak yang awalnya kita enggak jelas.

Jadi, kemungkinan kami selat ... saat pembuktian aja nanti disampaikan dan tulisannya juga kurang jelas. Yang pasti kami akan merenvoi TPS in ... yang pada

730. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mana Desa Olaya?

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Alinea pertama di huruf J, Yang Mulia. Huruf j (...)

732. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berkurang sebanyak 33 suara di Desa Olaya.

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Halaman 51, Yang Mulia.

734. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu halaman 51.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Kok, beda ya ... sudah untuk sementara sudah cukup, Yang Mulia

736. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oke, ya.

737. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah selesai, ya?

738. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah selesai.

739. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

740. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

741. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Mau direnvoi tapi yang dipakai renvoi enggak jelas juga. Ya, sudah.

Saya ada catatan lain. Ini juga Pemohon belum menyertakan softcopy daftar bukti, ya? Sesuai dengan PMK, ya? Yang dalam bentuk word. Softcopy dalam bentuk word, ya.

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya, sedang kita kerjakan. Seding penyerahan sekarang, Yang Mulia.

743. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sedang diserahkan. Seding, akan, itu jadi present apa itu? Present future?

Ya. Pemohon juga belum melengkapi Surat Kuasa dengan lampiran fotokopi KTA. Kenapa, ya? Banyak sekali yang ndak melampirkan KTA ini? Apa sedang bermasalah atau bagaimana ini?

Ya, ya. Nanti dilengkapi Pak, ya!

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Belum, Yang Mulia.

745. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

Kemudian dari buktinya ini yang disertakan itu Bukti P-1 sampai dengan P-6, ya?

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEIZALDI MUFTI

Ya.

747. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu tidak ada masalah. Sudah cocok antara ini tidak ada masalah seperti tadi. Antara judul dengan ininya ndak ada.

Dengan demikian, kami menyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami mohon kesediaan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk.

748. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak Ketua, terima kasih.

Baik, ya. Jadi, Permohonan yang tanggal 23 dengan register 86, siapa yang akan menyampaikan?

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Saya, Yang Mulia.

750. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, silakan!

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Terima kasih.

752. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, Pak!

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Saya hanya akan menyampaikan Pokok Permohonannya saja. Jadi, yang terkait kewenangan kemudian itu dianggap dibacakan.

Yang pertama adalah di Kabupaten Donggala untuk DPRD Kabupaten Donggala untuk DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala II. Bahwa dalam ketetapan Termohon terkait soal Partai PDI Perjuangan, suara Pemohon dengan suara Partai Keadilan Sejahtera terjadi penambahan terhadap suara Partai Keadilan Sejahtera di 4 TPS. Untuk DPRD Kabupaten Donggala Dapil II. Yang terjadi di 4 TPS. Yang pertama di TPS 3 Desa Batulaya ... Batusuya, mohon maaf. Kecamatan Sindue Tombusabora.

754. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sambone (...)

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Tambusabora. Kecamatan Sindue Tombusabora.

756. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambusabora, ya?

757. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya. Ini memang agak ini.

758. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. TPS 1 Desa (...)

759. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Kemudian TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan. Itu ada 4 suara penambahan. Kemudian, TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, ada 8 suara penambahan.

760. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

761. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan sebanyak=1 suara. Dan ini terjadi jug ... apa ... di dalam tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan DA-1 ... DA-1. Dan kemudian menjadi pedoman rekapitulasi ke atasnya begitu. Juga terjadi pengurangan suara Pemohon di 1 TPS. Itu di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora.

762. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya, sebanyak 12 suara. Sehingga, menyebabkan pengurangan dan penambahan terhadap ...pengurangan terhadap Pemohon dan penambahan terhadap Partai Keadilan Sejahtera menjadi berpengaruh terhadap komposisi keanggotaan DPR di Kabupaten Donggala yang seharusnya untuk suara part ... Pemohon=2.653. Sehingga, ini seharusnya kursi ke-6. Sementara, PKS harusnya mendapat suara 2.630 jadi, pada urutan ke-7. Sehingga, kami memohon Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara PKS, yang awalnya dua ra ... 2.649 menjadi yang benar adalah sebanyak 2.630, Yang Mulia.

764. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Berikutnya di dapil ... di Kabupaten Sigi DPRD Kabupaten Sigi Dapil V. Bahwa ini kami meminta adanya PSU di satu TPS, yaitu di Desa Bolobia dan desa itu hanya satu TPS. Bahwa ketika saksi mandat kami di PPK di Kecamatan Kinovaru mendapati tidak ada apa namanya ... dibuka kotak suara dan ketika dibuka kotak, tidak lihat C-7 dan sudah ada form keberatan, ya di DA-2. Kami sudah sertakan Bukti di P-5 dan atas itu Bawaslu Kabupaten memerintahkan adanya PSU, tapi karena tenggang waktu sudah melewati. Sehingga, Bawaslu sendiri waktu itu menyatakan ini adalah kewenangan ... menjadi kewenangan Mahkamah untuk jadi lempar batunya ke Mahkamah, begitu. Sehingga, ini kami meminta di sini ada PSU di TPS 1 Desa Bolobia.

766. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi penjelasan dari Bawaslu belum dilampirkan? Ada?

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ini hanya waktu itu lisan di dalam keterangan kami ini.

768. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk keberatan diajukan (...)

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Kalau di DA ... DA-2 itu ada, sudah kami lampirkan di Bukti P-5.

770. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Buk ... jawaban Bawaslu itu hanya lisan?

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya untuk (...)

772. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa itu sudah (...)

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya, untuk permasalahan yang ini, gitu.

774. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Baik.

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan keputusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan kap ... Keputusan KPU Nomor 987, dan seterusnya sepanjang ... bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPR ... Pemilihan Anggota DPRD.
 - 2.1 Kabupaten Donggala Dapil II, dan
 - 2.2 Kabupaten Sigi Dapil V.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk yang Anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut:
 1. Kabupaten Donggal Dapil II, PDI Perjuangan suara=2653. Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera=2630.
 2. Untuk Kabupaten Sigi Dapil V memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Bolobia.
4. memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

776. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Ya, catatan dari Kepaniteraan hanya kartu advokat yang belum, selebihnya tidak ada.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya. Kebetulan memang hampir semua ini di Kuasa belum mungkin dilampirkan. Jadi, sudah tadi dikoordinasi untuk semua dilampirkan. Demikian, Yang Mulia.

778. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Baik itu, Pak Ketua. Cuma tinggal alat bukti disahkan.

779. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Dr. Suhartoyo. Jadi, jangan lupa, ya KTA-nya itu di ... dilampirkan!

Untuk alat bukti yang Daerah Pemilihan Donggala II, Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-19, benar ya?

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

781. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada masalah, ini kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang P ... yang Sigi 5, P-1 sampai dengan P-8, betul?

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

783. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu ada sedikit problem cuma tidak ... tidak serius. Problemnnya adalah alat Bukti P-7 dengan P-8 nya tertukar. Ya, jadi itu. Jadi karena bukti fisiknya benar, itu cuma tertukar nanti tolong diinikan ... ini juga sudah bisa disahkan, terima kasih.

KETUK PALU 1X

Masih ada satu Permohonan, saya sudah konsultasi kiri kanan. Ini sudah memasuki jam Maghrib tetapi katanya masih bisa sampai kira-kira jam ... sampai 18.15 WIB atau 18.20 WIB, begitu. Jadi, yang terakhir untuk silakan Partai Gerindra! Ya.

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja karena waktu sudah terlalu mepet.

785. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Seluruh narasi baik pada posita dan petitium, kami anggap bacakan kecuali pada hal-hal pokok yang spesifik, ya. Pada halaman 5, Yang Mulia.

787. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman 5?

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Halaman 5. Narasi dan berpindah kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari partai politik lain.

789. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di mana itu?

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Halaman 5.

791. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baris berapa kira-kira ini?

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Halaman 5 pada Pokok Permohonan.

793. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokok Permohonan, ya.

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya dan berpindah kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari partai politik lain.

795. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Itu kita cabut.

797. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi dari ... dari mulai cabutnya mana?

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Dari dan.

799. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari dan?

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Dan berpindah kepada anggota calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari partai politik lain.

801. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu dicoret?

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Itu dicoret.

803. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, terus mana lagi?

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Sehingga konsekuensinya berubah kepada persandingan perolehan suara.

805. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu?

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Pada (...)

807. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tabel?

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Pihak Terkait Partai Perindo.

809. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang di halaman 5 juga masih itu?

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Halaman 5.

811. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Partai Perindonya jadi bagaimana?

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tetap. Versi Pemohon menjadi sama dengan versi Termohon.

813. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yaitu?

814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Yaitu 15.692.

815. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

15.694?

816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya, ya. 692 ya.

817. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

15.692, maaf.

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Akan tetapi terjadi perubahan pada versi Pemohon di kolom total.

819. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di mana itu?

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Kolom total.

Yang semula 234.752, maka itu berubah menjadi 242.888. Eh ... 242 ... di halaman 6 (...)

821. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang kolom ... kolom pertama?

822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Halaman 6.

823. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

Karena versi Pemohon di Pihak Terkait itu berubah ya. Maka total pada kolom versi Pemohon itu yang semula dari 234.752.

825. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi?

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Jumlah 242.888.

827. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Yang versi Pemohon?

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. 242.8000 eh ... 242.888.

829. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang jadi ke Pemohon, ya?

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Konsekuensinya, maka berubah kemudian pada petitum Nomor (...)

831. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bagaimana pada petitum?

832. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pada Petitum.

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Pada petitum Nomor 3.

834. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Petitum Nomor 3 halaman berapa itu?

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Pada kolom Partai Perindo.

836. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman berapa itu, Pak?

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Halaman 89.

838. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Halaman ... Ah?

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

69. Ya, mohon maaf atas (ucapan tidak terdengar jelas).

840. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya. Memang sudah agak sore pak. Jadi, ya ya.

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Halaman 69.

842. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi?

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Partai Perindo berarti jadi 15.692.

844. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

15.

845. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

15.692.

846. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

15.692? Ya.

847. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Akan tetapi totalnya.

848. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi?

849. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Berubah menjadi 242 ... 242.888 242.888.

850. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sesuai dengan yang tadi di depan, ya?

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya, di depan tadi.

852. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ada lagi?

853. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Saya kira itu cukup.

854. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, sekarang silakan disampaikan pokok-pokok. Oh, itu saja?

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Itu saja.

856. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu saja? Wah, ini (...)

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya, silakan ditafsirkan itu saja!

858. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu silakan ditafsirkan katanya. Ya, sudah. Jadi, kalau begitu anu ... ada catatan mengenai alat bukti, Pak, ya?

859. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

860. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak siapa namanya tadi? Lupa saya.

861. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Pak Saleh Hidayat.

862. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Saleh Hidayat.

863. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

864. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu P-1 nya itu. Bapak menyerahkan Bukti dari P-1 sampai dengan P-4, ya?

865. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

866. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang sudah ini, sudah dilegalisir. Kemudian, P-1 nya itu ternyata tidak cocok antara daftar alat bukti dan dengan bukti fisiknya. Nah, nanti disesuaikan Pak, ya!

867. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya, P-1?

868. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

P-1 nya tidak cocok antara apa namanya ... judul yang disebutkan di dalam daftar bukti dan bukti fisiknya.

869. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tidak cocok, ya?

870. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak cocok.

Demikian juga dengan P-3. P-3 ini bukan PPP loh maksudnya. P-3 ini, ya?

871. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya ya. Ndak cocok.

872. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ndak cocok antara judul dengan anunya ... dengan fisiknya.

873. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

874. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau ... karena sudah ... ya, kuasa yang ditarik itu, berarti gimana itu tadi?

875. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Untuk kuasa kan ada 3 orang Kuasa Hukum yang mengundurkan diri.

876. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

877. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Lalu mengalihkan ke saya. Kan begitu?

878. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu.

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tadi surat kuasanya sudah saya sampaikan.

880. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada surat kuasa yang baru?

881. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ada tadi.

882. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, yang tadi itu?

883. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Tadi.

884. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, yang sudah.

885. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Lupa saya ini KTA sama (ucapan tidak terdengar jelas).

886. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang kuasa lama itu yang dicabut berarti yang mana saja?

887. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Yang mengundurkan diri itu yang Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.,
Kemudian Rozy Fahmi, S.H., M.H., (...)

888. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian Ahmad Maulana?

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya. Itu yang sesuai dengan surat pengunduran diri saja.

890. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang Ahmad Maulana itu saja?

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Coba dilihat di surat kuasa yang baru.

892. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, selebihnya itu masih berlaku?

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Itu kuasa yang baru. Coba lihat dari kuasa yang baru.

894. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, yang ... yang baru itu memang ... memang anu ya ... benar-benar berbeda dari kuasa yang lama, ya?

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

896. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya sudah.

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Jadi, menyerahkan sepenuhnya itu.

898. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, yang lama berarti ndak berlaku itu, ya.

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH HIDAYAT

Ya.

900. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Jadi karena sudah kami di-silakan untuk tafsirkan sendiri. Maka kami tafsirkan juga bahwa persidangan sudah sudah cukup untuk Partai Gerindra. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menafsirkan.

Jadi, demikian saudara-saudara. Tapi, sebelum sidang saya tutup, saya mau mengumumkan untuk persidangan pemeriksaan ... pemeriksaan persidangan, khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah ... Sulawesi Utara, yang mencakup Perkara Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, Perkara Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai ... Golkar sudah ini ya, kemudian Partai Nomor 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemeriksaan persidangan dalam rangka Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan/atau Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti dari pihak-pihak yang bersangkutan itu akan dilaksanakan pada Selasa, 16 Juli 2019 pada Pukul 16.00 WIB. Sudah dicatat, ya? Selasa, 16 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB, itu untuk Agenda Pemeriksaan Persidangannya.

Sedangkan untuk Perbaikan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu untuk yang berkaitan dengan perkara ini, itu paling lambat sudah harus kami terima hari Jumat, 12 Juli pukul ... 12 Juli 2019 Pukul 12.00 WIB. Sekali lagi, Perbaikan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu paling lambat sudah kami terima pada 12 ... Jumat, 12 Juli 2019 Pukul 12.00 WIB. Itu untuk Sulawesi Tengah dengan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi.

Sori. Sulawesi Utara. Maaf. Ini typo juga ini sudah.

Sementara untuk Sulawesi Tengah dengan Perkara Nomor dua sat ... dua ti ... eh ... 213, ya? Tapi perkaranya tidak datang. Perkara

213/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kemudian Perkara 19-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara 2 ... 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kemudian Perkara 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Perkara 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu pemeriksaan persidangannya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pada pukul 14.00 WIB. Jangan sampai tertukar, ya pukul 14.00 WIB. Kalau yang Sulawesi Tengah.

Agendanya sama, Pemeriksaan persidangan untuk memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti dari pihak-pihak itu. Nah, untuk Perbaikan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu juga harus kami terima pada tanggal 12 Juli 2019 pada Pukul 12.00 WIB. Ada lagi pertanyaan?

Sudah cukup?

Gimana, Pak Taufik?

901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Mohon izin, Yang Mulia.

902. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Mohon izin diberikan kesempatan bagi kami untuk melengkapi tanda tangan kuasa dari Pihak Terkait. Takutnya nanti kalau kami minta ke Panitera mesti bertanya dulu. Karena itu mohon (...)

904. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Melengkapi ket ... apa? Tanda tangan?

905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Tanda tangan kuasa. Karena ada tig ... 2, 3, orang yang belum tanda tangan. Kalau boleh, kami lengkapi .

906. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, boleh. Orang Pemohon tadi juga masih melengkapi juga, masa Pihak Terkait tidak boleh?

907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAUFIK BASARI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

908. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Harus diperlakukan sama. Ya.

Silakan, Pak Taufik! Saya kira akan menyampaikan Permohonan baru itu. Soalnya kemarin ada itu yang anu, yang berpindah dari kuasa Pemohon jadi Kuasa Pihak Terkait, gitu. Bukan berpindah, merekap dua-duanya sehingga kebingungan harus ini. Sehingga saya panggil kuasa AC/DC itu, ya.

Ya.

909. KUASA TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Yang Mulia. mohon izin, Yang Mulia. Termohon Perkara Nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

910. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana?

911. KUASA TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Melalui Yang Mulia, kami meminta izin diberikan izin untuk minta salinan daftar alat bukti dari Pemohon.

912. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Salinan daf ... daftar alat bukti? Salinan daftar alat buktinya boleh. Nanti di ... diinikan dengan (...)

913. KUASA TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Di bawah?

914. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di bawah. Mau inzage juga boleh. Ya. Boleh.

915. KUASA TERMOHON: ASEP ANDRIYANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

916. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya?

Baik. Dengan demikian, persidangan untuk hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18:10 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1
001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.